

## DWP RIAU DIHARAPKAN JADI MOTOR PENGGERAK PENAGGULANGAN STUNTING DI PROVINSI RIAU



Sumber gambar:

[https://www.riauin.com/foto\\_berita/23835883067-sukses-tekan-tengkes-pemprov-riau.jpeg](https://www.riauin.com/foto_berita/23835883067-sukses-tekan-tengkes-pemprov-riau.jpeg)

Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan membuka acara puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke - 25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Riau.

Sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP memegang peranan kunci dalam membangun karakter keluarga. Mulai dari menjaga kesehatan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

“DWP memegang peran strategis dalam pembangunan keluarga ASN. Kita perlu mendorong peran aktif anggota DWP agar berkontribusi lebih untuk mendukung dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” kata Job Kurniawan di Gedung Daerah Balai Serindit. Selasa, (10/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II mengajak seluruh anggota DWP baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, untuk dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau.

Asisten II mencontohkan, hal ini dapat dimulai dari hal kecil, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat dilingkungan sekitar, mengenai pentingnya pola makan sehat dan bergizi.

“Kami berharap anggota DWP yang hadir pada hari ini, dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan stunting melalui pendidikan kepada keluarga,” katanya.

Asisten II menuturkan bahwa persoalan stunting bukanlah hal sepele dan perlu disoroti dengan serius. Sebab menurutnya, stunting tak hanya sekadar kondisi gagal tumbuh pada anak saja, namun juga berpengaruh terhadap kecerdasan mereka. Dimana hal ini nantinya akan menjadi permasalahan bagi pembangunan manusia di Indonesia.

“Karena stunting ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang kemudian berpotensi menjadikan generasi penerus yang kurang optimal. Untuk itu saya mengajak seluruh anggota DWP se-Provinsi Riau untuk dapat berperan aktif dalam program penanggulangan stunting ini,” ajaknya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan serangkaian upaya. Mulai dari pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota untuk pengadaan alat Antropometri, hingga menggelar kegiatan intervensi serentak untuk pencegahan stunting atau tengkes ke seluruh wilayah di Bumi Lancang Kuning.

Hasilnya saat ini prevalensi stunting di Provinsi Riau berhasil ditekan hingga angka 13,6 persen. Dimana angka tersebut telah melewati target nasional yaitu 14 persen untuk tahun 2024.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/89229/dwp-riau-diharapkan-jadi-motor-penggerak-pena.html>, “DWP Riau Diharapkan Jadi Motor Penggerak Penanggulangan Stunting di Provinsi Riau”, 11 Desember 2024; dan
2. <https://www.riauin.com/read-43205-2024-12-11-dwp-diminta-jadi-penggerak-utama-upaya-penurunan-stunting-di-provinsi-riau.html>, “DWP Diminta Jadi Penggerak Utama Upaya Penurunan Stunting di Provinsi Riau”, 11 Desember 2024.

#### **Catatan:**

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pengertian *stunting* yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Sedangkan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, di informasikan bahwa kegiatan prioritas rencana aksi meliputi:

- a) penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- b) pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c) pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- d) surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
- e) audit kasus *Stunting*;
- f) perencanaan dan penganggaran;
- g) pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menginformasikan bahwa terdapat 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu:

- 1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program Bangga Kencana berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu fokus dari program Bangga Kencana, yaitu penurunan *Stunting* yang juga menjadi program strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI). Terdapat 4 (empat) kebijakan program Bangga Kencana yaitu:

- 1) Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi berupa peningkatan kualitas dan pemanfaatan data program bangga kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah;
- 2) Meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komperhensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran; dan
- 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau